

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang pembangunan di segala bidang harus ditingkatkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut di perlukan kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pajak daerah berperan penting sebagai sumber pendapatan daerah untuk pembangunan daerah, karena pajak daerah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana untuk menunjang kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk membiayai dan mengatur sumber-sumber daya daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah. Adapun macam Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok merupakan pajak daerah provinsi. Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak daerah kota/kabupaten (Resmi,2016:8).

Pajak daerah yang mendapatkan penerimaan pajak yang cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

Di Indonesia meningkatnya tingkat populasi kendaraan bermotor ditandai dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di masyarakat. Berikut jumlah kendaraan bermotor per-pulau tertera di tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor

No	Nama Pulau	Mobil Pribadi	Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
1	Jawa	9,494,410	88,524	2,141,465	56,153,859	41,674
2	Sumatera	2,257,408	24,411	1,054,711	20,045,216	17,502
3	Kalimantan	472,065	7,732	324,097	5,568,617	2,677
4	Sulawesi	473,755	3,793	184,435	3,368,624	1,235
5	Bali	373,658	7,481	137,861	3,210,911	722
6	Nusa Tenggara	117,344	3,418	88,730	1,941,485	638
7	Papua	48,632	832	30,052	558,337	348
8	Maluku	15,870	184	9,526	238,483	176
<b>Total</b>		13,253,142	136,375	3,970,877	91,085,532	64,972

Sumber: Paryadi.com Jumlah kendaraan Bermotor per-pulau 2018

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah Mobil Pribadi 13.253.142, jumlah Bus 136.375 , jumlah Mobil Barang 3.970.877, Sepeda Motor 91.085.532 dan Kendaraan Khusus 64.972 dimana jumlah kendaraan tersebut menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu pemerintah daerah mengoptimalkan sumber penerimaan dana pemungutan pajak. Salah satu pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak Angkutan Umum Orang. Angkutan Umum

Orang merupakan suatu penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan menggunakan kendaraan umum dari suatu tempat ke tempat lain. Angkutan umum orang salah satu peranan penting untuk pembangunan perekonomian di Indonesia karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Orang biasanya dipungut oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah masing-masing daerah/kota untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sesuai domisili kendaraannya.

Kota Sukabumi mengalami tingkat populasi kendaraan angkutan umum orang yang cukup padat sehingga Pemungutan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang cukup banyak, berikut jumlah kendaraan angkutan umum orang di Kota Sukabumi tertera di tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

Tabel Jumlah Angkutan Umum Orang

Unit Pelayanan Pendapatan	Jenis Angkutan Umum Orang					Total
	Sedan/ sejenisnya	Mini Bus / sejenisnya	Bus/ sejenisnya	Roda Empat	Sepeda Motor	
Kota Sukabumi	2,322	2,305	593	3,163	.-	8,383

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Jawa barat, 2018

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa jumlah angkutan umum orang di Kota Sukabumi Total kurang-lebih 8,383 unit, akan tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum dalam Melaksanakan kewajiban pajaknya. Masih Banyak wajib Pajak yang telat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum. Keengganan

untuk membayar kewajiban pajak masih tinggi. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan yang masih sangat kurang.

Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mempunyai tugas ekstra dengan menerapkan cara yang baik dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang untuk membayar pajak agar memudahkan tercapainya realisasi target pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Penerapan yang baik akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang khususnya untuk Kota Sukabumi dengan mengajukan judul “**Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi**”

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut ini masalah-masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Bagaimana kondisi Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi ?

2. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi ?
3. Bagaimana cara perhitungan atas tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi ?
4. Apa saja kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui kondisi Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi ?
2. Untuk mengetahui sistem dan prodesur pemungutan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi
3. Untuk mengetahui tata cara perhitungan atas tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi
4. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis susun ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, baik secara teori maupun praktek, khususnya

mengenai pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang yang pada umumnya sering dilakukan masyarakat setiap tahun.

## 2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai bahan acuan atau referensi pihak yang membutuhkan

## 3. Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik yaitu untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan serta bahan masukan pada penelitian yang sejenis

## 5. Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa yaitu menambah wawasan dan sumber referensi di bidang perpajakan dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya yang menyangkut tentang pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang.

## 5. Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu untuk menambah referensi dan bahan acuan mahasiswa dalam penyusunan laporan tugas akhir untuk masa yang akan datang.

### **1.5 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode tugas akhir ini yaitu penelitian Deskriptif, pengertian penelitian Metode Deskriptif menurut Nazir (2014:43) adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat

deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Kesimpulan metode di atas bahwa penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek dengan menggambarkan secara deskripsi berdasarkan realita dan fakta.

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data yang dimaksud yaitu dengan menggali teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, mencari metode serta teknik penelitian, mengumpulkan data, mengumpulkan dan mempelajari referensi dari buku-buku, serta mengumpulkan informasi dari situs web yang ada sangkutpautnya dengan penyusunan laporan tugas akhir ini.

### **2. Observasi**

Observasi merupakan metode pengambilan data dengan cara terjun langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain dan mencatat sehubungan dengan penelitian tugas akhir ini. Penulis melakukan observasi langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

### **3. Wawancara**

Wawancara yang dimaksud adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab antara si penanya dan si penjawab. Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

